BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh inflasi dan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap pengeluaran pemerintah maka pada bagian akhir dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sekaligus saran sebagai berikut :

5.1 Kesimpulan

1. Indonesia mengalami laju inflasi yang berfluktuatif, sehingga mempengaruhi dikeluarkannya seperangkat kebijaksanaan-kebijaksanaan yang bertujuan untuk memulihkan kondisi pada saat ini jika kita lihat perkembangan laju inflasi pada orde lama, orde baru dan pasca baru mempunyai persoalan-persoalan terkendali yang menyebabkan tinggi rendahnya laju inflasi di Indonesia. Pada pertengahan tahun 1997, Indonesia kembali terpuruk yang berawal dari terdepresiasinya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang menyebabkan naiknya harga-harga barang kembali terjadi. Tingginya inflasi tersebut disebabkan oleh tingginya struktur dari segi permintaan dan penawaran.
2. Penerimaan PPN terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tetapi pada tahun 2009 penerimaan PPN mengalami penurunan hal ini disebabkan karena buruknya kinerja administrasi penarikan pajak. Bagi pemerintah Indonesia meningkatkan penerimaan pajak merupakan tantangan besar dalam rangka memelihara kebijakan fiscal yang

berkelanjutan (*sustainable fiscal policy*) dan sekaligus menciptakan stimulus bagi bergeraknya roda perekonomian masyarakat (fiscal stimulus). Pajak berperan dalam mengatur sumber-sumber ekonomi, alokasi, distribusi dan stabilitasi. Oleh karena itu pajak mempunyai fungsi strategis bagi Negara Republik Indonesia.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak salah satunya ditempuh melalui reformasi kebijakan perpajakan, dimana hal ini sudah dilakukan sejak tahun 1983 dengan perubahan sistem perpajakan dari sistem *self assessment*. Sementara disisi lain lingkungan yang dihadapi selalu berubah (perkembangan kondisi politik dan sosial ekonomi), sehingga pemerintah memandang perlu untuk menggulirkan kembali reformasi perpajakannya,

3. Pengeluaran Pemerintah dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, sebagaimana teori Musgrave dan Rostow menyatakan perkembangan pengeluaran negara sejalan dengan tahap perkembangan ekonomi dari suatu negara. Menurut Wagner menyatakan berdasarkan pengamatan dari negara-negara maju, disimpulkan bahwa dalam perekonomian suatu negara, pengeluaran pemerintah akan meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita negara tersebut. Pertumbuhan pengeluaran pemerintah Indonesia dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Meningkatnya pengeluaran pemerintah ini berkaitan erat dengan naiknya pengeluaran untuk belanja pegawai. Penurunan pengeluaran pemerintah terjadi antara tahun 1998/1999,

penurunan ini tidak disertai dengan penurunan kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap pembentukan *Product Domestik Bruto* (PDB) riil. Penurunan ini terjadi karena dampak dari krisis yang berlangsung pada tahun sebelumnya, sehingga pemerintah harus mengurangi pengeluarannya, khususnya belanja pegawai.

4. Berdasarkan hasil penelitian antara pengaruh inflasi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bahwa inflasi mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Nilai negatif artinya berbanding terbalik, maka jika inflasi turun maka penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan naik.
5. Mengingat inflasi selalu mengalami fluaktuasi, maka pengaruh inflasi dengan pengeluaran pemerintah diperoleh tidak signifikan. Dalam hal dampak kebijakan fiskal terhadap output dan inflasi, kesimpulan pertama yaitu shock kenaikan pengeluaran pemerintah berdampak positif terhadap PDB sementara shock kenaikan pajak berdampak menurunkan PDB. Dampak positif dari pengeluaran pemerintah dan dampak negatif dari pajak tersebut sejalan dengan teori Keynes tentang peran pengeluaran pemerintah dalam menggerakkan perekonomian serta sesuai dengan penelitian empiris dibeberapa Negara maju. Kedua, lebih dominannya pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap PDB dibandingkan dengan pajak menunjukkan masih cukup efektifnya kebijakan ini untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi khususnya dalam masa resesi dibandingkan dengan pajak. Ketiga, dampak *shock* pada pengeluaran

pemerintah terhadap penurunan inflasi kemungkinan dapat dijelaskan oleh dampak *multiplier* dari pengeluaran pemerintah untuk investasi (diantaranya infrastruktur) yang lebih besar dibandingkan pengeluaran rutin. Pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur diperkirakan dapat memperbaiki distribusi barang dan jasa sehingga berkontribusi terhadap penurunan inflasi. Keempat, dampak kenaikan inflasi akibat *shock* peningkatan pajak kemungkinan dipicu oleh peningkatan pajak yang dipandang sebagai peningkatan biaya produksi dan biaya penjualan kepada konsumen.

6. Pengaruh penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadp pengeluaran pemerintah, bahwa penerimaan PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran pemerintah. Nilai positif menunjukkan pengaruh penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pengeluaran pemerintah searah, yang artinya jika penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) meningkat, maka pengeluaran pemerintah pun ikut meningkat. Hubungan antara pajak dangan PBD berangkat dari hubunngannya dengan sektor penerimaan dan belanja pemerintah yang dalam rumusan GDP disebut government spending. Keberadaan pemerintah dalam GDP tersebut memungkinkan kita mempelajari fiskal, kemampuan pemerintah untuk menggunakan kekuatan perpajakan dan pembelanjaan guna mempengaruhi tingkat pendapatan nasional. Sebab terdapat PDB lain yang mempunyai hubungan erat dengan perpajakan yaitu konsumsi/ *consumption*. Kembali kepada pengertian pajak yaitu kewajiban

menyerahkan sebagian dari kekayaan (individu maupun badan) ke kas negara, dapat disimpulkan bahwa sejatinya pajak juga mengurangi kekayaan rumah tangga untuk diserahkan pada negara dan menurut propensiti konsumsi marginal akan mengurangi pengeluaran konsumsi diinginkan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan, dapat kiranya diajukan saran sebagai berikut :

1. Untuk menangulangi inflasi, maka pemerintah perlu menerapkan kebijakan fiskal dan moneter yang tepat. Tujuan kebijakan tersebut untuk menjaga kestabilan nilai tukar dan kestabilan harga dengan tepat. Bahwa pada dasarnya tingkat inflasi di Indonesia cukup tinggi karena tingginya tingkat jumlah uang beredar dan tekanan perekonomian, Pemerintah seharusnya tetap dan benar-benar memegang teguh sikap yang penuh kehati-hatian dalam pengambilan kebijakan ekonomi. Hal ini ditujukan untuk menimbulkan dalam penyejukan terhadap perkembangan kegiatan ekonomi.
2. Perlu dikaji ulang kebijakan perpajakan di bidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), karena belajar dari negara-negara yang tax ratio pajak secara keseluruhannya sudah tinggi, mereka cenderung konservatif dalam kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini karena dimaklumi bahwa kebijakan tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terkait langsung dengan kelancaran arus barang dan jasa yang merupakan prasyarat

bergeraknya roda perekonomian dan akan menciptakan *multiplier effect* yang pada gilirannya akan meningkatkan potensi pajak secara keseluruhan.

3. Dari sisi *Aggregate Supply*, kondisi ini memerlukan pengendalian dan penataan sektor riil secara efektif. Stimulus kebijakan fiskal ekspansif melalui pengeluaran pemerintah untuk investasi, kebijakan upah, kebijakan bea masuk impor bahan baku produksi, penataan sistem serta mekanisme kerja sektor riil menyangkut regulasi dan kelembagaan yang menggairahkan sektor produksi, merupakan alternative dalam mengendalikan tekanan inflasi.